

Strategi Kebijakan Administrasi Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat

Zahransiyah Hanayuka

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: zahransiyahhanayuka10@gmail.com

Keywords: <i>Policy</i> <i>Water pollution</i> <i>POAC</i> <i>Citarum River</i> <i>Prevention Strategy</i>	Abstract: <i>This study aims to analyze the strategy of environmental administration policy in preventing water pollution of the Citarum River in West Bandung Regency. The method used is descriptive qualitative research based on literature studies, with a management function analysis approach from George R. Terry (1977). The results of the study indicate that the condition of the Citarum River in West Bandung Regency is still heavily polluted, with the discovery of heavy metals and active pharmaceutical substances in the waters. The implementation of environmental administration policy strategies has not been optimal, marked by ineffective inter-agency coordination and unsustainable program implementation. The main inhibiting factors are low coordination and community participation, while the supporting factors are national regulations. This study concludes that strengthening environmental administration based on POAC is needed to improve the Citarum River management system collaboratively and sustainably. Strategic recommendations are provided to improve the effectiveness of planning, organizing, implementing, and supervising environmental programs at the regional level.</i>
Kata Kunci: <i>Kebijakan</i> <i>Pencemaran air</i> <i>POAC</i> <i>Sungai Citarum</i> <i>Strategi Pencegahan</i>	Abstrak: <i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan administrasi lingkungan dalam pencegahan pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan pendekatan analisis fungsi manajemen dari George R. Terry (1977). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat masih tercemar berat, dengan ditemukannya logam berat dan zat aktif farmasi di perairan. Penerapan strategi kebijakan administrasi lingkungan belum optimal, ditandai dengan koordinasi antarinstansi yang kurang efektif dan pelaksanaan program yang tidak berkelanjutan. Faktor penghambat utama adalah rendahnya koordinasi dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor pendukung adalah regulasi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan administrasi lingkungan berbasis POAC diperlukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sungai Citarum secara kolaboratif dan berkelanjutan. Rekomendasi strategis diberikan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program lingkungan di tingkat daerah.</i>

Pendahuluan

Sungai Citarum merupakan salah satu sumber daya air utama di Provinsi Jawa Barat yang hulunya berada di Gunung Wayang dan mengalir melalui berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang memiliki nilai vital dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sungai ini mengalir sepanjang 297 kilometer, melintasi 12 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah yang berada di bagian hulu hingga tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum (Agustine, 2021). Di wilayah ini, Sungai Citarum tidak hanya menjadi sumber irigasi pertanian dan air baku, tetapi juga menjadi lokasi aktivitas industri dan permukiman padat yang berkontribusi besar terhadap pencemaran air. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu daerah yang dilintasi oleh aliran Sungai Citarum. Kabupaten Bandung Barat memiliki karakteristik geografis yang khas sebagai wilayah transisi antara kawasan hulu dan tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Wilayah ini menjadi salah satu titik penting dalam sistem hidrologi Sungai Citarum, dengan fungsi strategis sebagai sumber irigasi pertanian, penyedia air baku, serta pendukung kegiatan ekonomi lokal, termasuk sektor industri dan pariwisata. Namun, dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan jumlah penduduk, ekspansi permukiman, dan peningkatan aktivitas industri di Kabupaten Bandung Barat telah memberikan tekanan besar terhadap kelestarian lingkungan Sungai Citarum. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, seperti Batujajar, Cililin, dan Cipongkor, menjadi contoh wilayah yang terdampak serius, di mana aktivitas domestik dan industri kecil menengah tanpa pengelolaan limbah yang memadai berkontribusi terhadap pencemaran air. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai, lemahnya sistem pengelolaan limbah domestik, dan terbatasnya kapasitas pengawasan lingkungan dari pihak pemerintah daerah memperburuk kondisi pencemaran yang ada. Dengan posisinya yang strategis, namun rentan terhadap kerusakan ekologis, Kabupaten Bandung Barat menjadi lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji strategi kebijakan administrasi lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran air Sungai Citarum. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan kebutuhan akan model pengelolaan

lingkungan yang efektif dan dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa di sepanjang DAS Citarum.

Namun, alih-alih menjadi sumber kehidupan yang lestari, Sungai Citarum justru dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Di wilayah Kabupaten Bandung Barat sendiri, berdasarkan data dari Bappenas 2014 dalam (Andri & Aziz, 2021). Saat ini, pencemaran sungai Citarum menghadapi berbagai masalah yang kompleks, termasuk pencemaran, banjir, sedimentasi, limbah rumah tangga, limbah industri, dan krisis air bersih. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dimuat oleh (Ramdhani & Gabrillin, 2022) mengatakan bahwa di sungai Citarum ditemukannya obat parasetamol dan banyak bahan aktif yang mencemari Sungai Citarum, termasuk nikotin, carbamazepine, yang biasa digunakan untuk epilepsi, metformin, yang biasa digunakan untuk diabetes, dan sejumlah antibiotik. Fenomena pencemaran sungai bukan hanya terjadi di Jawa Barat, namun juga menjadi isu nasional yang berulang di banyak wilayah Indonesia. Permasalahan utama yang kerap terjadi adalah buruknya pengelolaan limbah, lemahnya penegakan hukum lingkungan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dimuat dalam (Tempo.co, 2021) menuturkan bahwa pencemaran sungai Indonesia disebabkan oleh 59% limbah industri seperti migas dan pertambangan, serta limbah rumah tangga dan peternakan). Karena limbah ini, biota di aliran sungai tidak dapat hidup karena kekurangan oksigen. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu pencemaran air sudah menjadi persoalan struktural yang menuntut intervensi strategis melalui pendekatan administrasi lingkungan yang efektif.

Permasalahan pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji karena menyangkut aspek lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Sungai Citarum tidak hanya berfungsi sebagai sumber air bagi kebutuhan domestik dan pertanian, tetapi juga memiliki peran vital dalam menunjang ketahanan air nasional, khususnya pasokan air baku bagi jutaan penduduk di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Fenomena sosial yang muncul dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencemaran Citarum bukan sekadar persoalan teknis, namun juga persoalan administratif dan perilaku. Dalam studi

(Agustine, 2021) ditemukan bahwa Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat sangat penting untuk membangun strategi kebijakan dalam pencegahan pencemaran air sungai citarum, seperti kebijakan dari pemerintah pusat, kebijakan dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, dan partisipasi dari masyarakat menjadi sangat penting, karena jika keinginan masyarakat yang tidak tersampaikan karena komunikasi, maka akan semakin memperuncing permasalahan. Penelitian (Imansyah, 2012) juga menegaskan pentingnya sinergi pemerintah-masyarakat dalam menanggulangi pencemaran di hulu Sungai Citarum, dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui mengedukasi masyarakat secara intensif, meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menegakkan aturan dan hukum secara jelas, pengadaan fasilitas dan infrastruktur, dan membentuk masyarakat yang tanggap terhadap bencana. Penelitian (Setiady, 2024), undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pengelolaan lingkungan hidup di seluruh negara yang menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data dari (Kementerian PPN/Bappenas, 2023) menyebutkan bahwa aliran DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum melintasi 12 kabupaten/kota dengan total jumlah penduduk sekitar DAS Citarum ± 18 juta jiwa. Wilayah DAS Citarum memiliki luas 11.323 km² atau 32% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Sungai ini mengairi 420.000 hektare pertanian, menyuplai 80 persen air baku Jakarta, dan menerima sekitar 20.462 ton sampah setiap hari. Selain itu, sungai ini memutar turbin di tiga PLTA, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, yang menghasilkan 1.888 MW listrik untuk interkoneksi Jawa-Bali (Bandung Bergerak, 2024). Namun, menurut laporan Satgas Citarum Harum, hingga tahun 2023, lebih dari 100 titik sepanjang aliran Sungai Citarum, termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, logam berat seperti kadar besi terlarut maksimal 23,4 kg/hari, mangan (Mn) 8,29 kg/hari, tembaga (Cu) 51,1 kg/hari, dan seng (Zn) 57,3 kg/hari masih ditemukan (Setiady, 2024). Jika dikaji lebih lanjut, permasalahan ini semakin mengerucut di wilayah Jawa Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan industri, permukiman, dan urbanisasi yang tinggi. Di Kabupaten Bandung Barat, dampak pencemaran Sungai Citarum menjadi sangat terasa, khususnya di wilayah Saguling dan Batujajar yang

merupakan area padat penduduk dan dekat dengan kawasan industri (Kumparan News, 2024). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Agustine, 2021), yang mencatat bahwa sebagian warga telah mengalami efek tercemar air Citarum, seperti penyakit kulit, infeksi, penyakit saluran pernapasan, dan batuk karena bau yang menyengat dari air sungai dan sumur warga yang kini kekuningan, yang dapat membahayakan kesehatan. Maka situasi ini mencerminkan bahwa pencemaran air Sungai Citarum bukan hanya isu lingkungan, melainkan juga persoalan kesehatan publik dan kesejahteraan sosial.

Secara teoritis, permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan Administrasi Lingkungan berbasis fungsi manajerial yang dikemukakan oleh George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023) yang menegaskan bahwa terdapat empat fungsi manajemen POAC, yakni Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan/pelaksanaan (*Actuating*) dan Kontrol/evaluasi (*controlling*). Jika dikaitkan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti, teori tersebut menyangkut ketidakefektifan perencanaan lingkungan, lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya motivasi pelaksanaan program, serta lemahnya sistem pengawasan yang menjadi faktor-faktor yang memperburuk kondisi pencemaran. Teori George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023), menegaskan:

1. Perencanaan (*Planning*)

Ini dapat didefinisikan sebagai penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dan diinginkan. George R. Terry (1977) menyebutkan beberapa tindakan yang dilakukan selama proses perencanaan. Ini termasuk memberikan penjelasan dan pemantapan tujuan yang ingin dicapai, membuat kebijakan dan prosedur yang harus diikuti, dan memperkirakan peristiwa dan kemungkinan yang akan terjadi.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen yang mengelompokkan orang dan menetapkan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing individu untuk berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

3. Pelaksanaan/Pengarahan (*Actuating*)

Merupakan usaha untuk mengubah rencana yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Jika dilakukan secara efektif dan efisien, itu akan memiliki nilai.

4. Pengawasan/Evaluasi (*Controlling*)

Mengamati, merekam, memberikan penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan meluruskan dan memperbaiki kesalahan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan.

Pada tingkat kebijakan, pemerintah mengeluarkan program terbaru Program Citarum Harum pada Februari 2018 melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018. Program ini bertujuan untuk memulihkan kembali sungai terpanjang di Jawa Barat, yang memiliki potensi yang luar biasa untuk kehidupan masyarakat Jawa Barat (Andri & Aziz, 2021). Tetapi meskipun telah diluncurkan Program Citarum Harum melalui (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, n.d.), kenyataannya di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, penerapan strategi kebijakan administrasi lingkungan belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih banyak ditemukan inkonsistensi dalam pelaksanaan program, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kolaborasi lintas sektor yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan dari program tersebut. Oleh karena itu, judul penelitian ini, "*Strategi Kebijakan Administrasi Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat*", menjadi sangat penting dibahas karena mencerminkan kebutuhan akan model pengelolaan lingkungan berbasis manajemen yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi kebijakan administrasi lingkungan berperan dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan secara kolaboratif antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya kajian akademik di bidang administrasi publik dan lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah, dunia industri, dan masyarakat dalam memperbaiki model pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Pertanyaan penelitian studi ini adalah berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. Bagaimana kondisi pencemaran air Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung Barat saat ini?
2. Bagaimana strategi kebijakan administrasi lingkungan, khususnya fungsi *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC), diterapkan dalam pencegahan pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan strategi kebijakan administrasi lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran air di wilayah tersebut?
4. Bagaimana peran pemerintah daerah, industri, dan masyarakat dalam mendukung efektivitas administrasi lingkungan untuk mencegah pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat?
5. Apa rekomendasi strategis yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas administrasi lingkungan dalam mencegah pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat?

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kondisi aktual pencemaran air Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab pencemaran yang berkaitan dengan aktivitas industri, permukiman, serta lemahnya sistem pengelolaan lingkungan yang ada. Melalui pendekatan administrasi lingkungan, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana fungsi-fungsi administrasi, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang telah diterapkan dalam upaya pencegahan pencemaran sungai. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis pemerintah daerah, dunia industri, serta partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan strategi kebijakan administrasi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah perbaikan yang konkret dan berbasis administrasi publik dalam mendukung pemulihan

dan pelestarian kualitas air Sungai Citarum, khususnya di kawasan Kabupaten Bandung Barat. Melalui analisis yang dilakukan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat efektivitas program-program pemerintah, seperti Program Citarum Harum, serta mendorong lahirnya model administrasi lingkungan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tingkat daerah. Berdasarkan uraian peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pendekatan administrasi lingkungan yang strategis, terencana, dan terukur, khususnya dalam konteks pencegahan pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat. Wilayah ini merupakan bagian krusial dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, sehingga keberhasilannya dalam mengelola pencemaran akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan di tingkat provinsi bahkan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan guna memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap penguatan tata kelola lingkungan di Indonesia.

Tabel 1
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

No	Keterangan	Keterangan
1	Panjang Sungai	297 kilometer
2	Mengaliri Irigasi	14.100 <i>hektare</i>
3	Sumber Air Minum	80% per 2025
4	Luas Daerah Aliran	6.910 kilometer (2.670 <i>measure of area</i>)
5	Menghasilkan Listrik	(1.888 <i>Megawatt</i>) Mencakup: 1. Waduk Saguling 2. Waduk Jatiluhur 3. Waduk Cirata
6	Melewati Kabupaten/Kota	1. Kabupaten Bandung 2. Kabupaten Bandung Barat 3. Kabupaten Cianjur

	4. Kabupaten Sumedang 5. Kabupaten Bogor 6. Kabupaten Purwakarta 7. Kabupaten Bekasi 8. Kabupaten Karawang 9. Kabupaten Indramayu 10. Kabupaten Subang 11. Kota Bandung 12. Kota Cimahi
--	---

Sumber: Pinter Politik (2018), Setyaningrum (2022), Wikipedia (2025), diolah oleh peneliti (2025)

Tinjauan Literatur

Penelitian tentang permasalahan pencemaran Sungai Citarum telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari perspektif hukum, lingkungan, maupun administrasi terkait pencemaran Sungai Citarum dan upaya pengelolaannya.

1. Administrasi

Administrasi berasal dari kata Latin *ad*, yang berarti "kepada" dan *ministrare*, yang berarti "melayani" atau "mengatur". Secara umum, administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses untuk mengatur dan mengelola semua usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif dan efisien. Sondang P. Siagian (Marliani, n.d.) menggambarkan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua atau lebih individu untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep dasar administrasi ini yakni proses mengelola kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk mengelola berbagai upaya pencegahan pencemaran di Sungai Citarum Kabupaten Bandung Barat. Kaitannya dengan penelitian yang sedang peneliti kaji ialah untuk mengatur berbagai pihak (pemerintah, industri, masyarakat) agar

bisa bekerja sama menyelamatkan Sungai Citarum yang membutuhkan sistem administrasi yang tertib dan efektif.

- **Tujuan Administrasi**

Pelayanan publik terbaik adalah tujuan administrasi publik. Administrasi berusaha untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Oleh karena itu, kegiatan administrasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja seseorang untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional (Marliani, n.d.).

Tujuan administrasi yaitu untuk mencapai hasil sebaik-baiknya dengan daya guna dan hasil guna maksimal, relevan dengan permasalahan pencemaran Citarum yang membutuhkan solusi efektif dan efisien. Kaitannya dengan penelitian yang sedang peneliti kaji ialah pencegahan pencemaran sungai ini harus menggunakan administrasi yang bertujuan mendorong efektivitas (air sungai benar-benar bersih) dan efisiensi (menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam pelaksanaan program pencegahan).

- **Fungsi Administrasi**

Sebagaimana dinyatakan oleh George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023), ada empat fungsi manajemen POAC: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan/pelaksanaan (*actuating*), dan (*control*)/evaluasi.

- a. **Perencanaan (*Planning*)**

Ini dapat digambarkan sebagai penentuan serangkaian langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan diharapkan. George R. Terry menyebutkan beberapa tindakan yang dilakukan selama proses perencanaan. Ini termasuk menjelaskan dan memantapkan tujuan yang ingin dicapai, meramalkan peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari, membuat kebijakan dan prosedur yang harus diikuti, dan memperkirakan peristiwa dan kemungkinan yang akan terjadi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Ini dapat digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen yang mengelompokkan orang dan menetapkan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

c. Pelaksanaan/Pengarahan (*Actuating*)

Merupakan upaya untuk mencapai tujuan melalui implementasi rencana yang telah dibuat. Itu akan memiliki nilai jika dilakukan dengan baik dan efisien.

d. Pengawasan/Evaluasi (*Controlling*)

Mengamati, merekam, memberikan penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan meluruskan dan memperbaiki kesalahan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan.

Kaitannya dengan penelitian yang sedang peneliti kaji ialah fungsi-fungsi ini harus dijalankan dengan baik agar program seperti Citarum Harum benar-benar mengurangi pencemaran di Kabupaten Bandung Barat yang selama ini menurut penelitian terdahulu belum optimal.

- **Prinsip Administrasi**

Prinsip administrasi yang dibuat oleh Gulick & Urwick pada tahun 1937 melalui tulisannya yang berjudul *Papers on the Science of Administration*. Pada bukunya Gulick & Urwick (1937) dalam (Wicaksono, 2013) mengatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi terdiri dari lima hal: prinsip hirarki, kesatuan komando, spesialisasi fungsional, rentang kendali, dan desain organisasi rasional.

a. Prinsip Hirarki

Hirarki di sini dirancang untuk meningkatkan kontrol sehingga standar dapat dipatuhi. Akibatnya, struktur organisasi disusun dengan struktur atasan dan bawahan yang jelas dan rantai komando yang kuat (Wicaksono, 2013)

b. Prinsip Kesatuan Komando

Prinsip kesatuan komando menekankan betapa pentingnya mengkomunikasikan instruksi yang diberikan atasan kepada bawahannya secara efektif. Jadi, hanya satu pejabat pada setiap level organisasi yang harus

memberikan perintah kepada bawahannya. Sebab jika seorang pegawai bekerja untuk lebih dari satu atasan, pegawai tersebut (sebagai bawahan) akan merasa bingung dan tidak efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Wicaksono, 2013)

c. Prinsip Spesialisasi Fungsional

Prinsip spesialisasi fungsional adalah salah satu prinsip administrasi yang menentukan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang pegawai, sehingga struktur organisasi tidak terlalu berjenjang panjang (Wicaksono, 2013)

d. Prinsip Rentang Kendali

Menurut prinsip rentang kendali, seorang atasan harus memiliki sedikit bawahan agar mereka dapat mengawasi dan mengendalikan mereka dengan baik (Wicaksono, 2013)

e. Prinsip Desain Organisasi Rasional

Saat membangun sebuah organisasi, prinsip-prinsip desain organisasi rasional diterapkan. Prinsip ini bergantung pada berbagai hal, seperti tujuan, klien yang dilayani, tempat, proses, dan tujuan pelayanan. Pengadilan, misalnya, adalah organisasi yang didesain berdasarkan tujuan, sementara klinik pemulihan ketergantungan narkoba di rumah sakit milik pemerintah melayani pasien ketergantungan narkoba (Wicaksono, 2013).

Kaitannya dengan penelitian yang sedang peneliti kaji ialah prinsip-prinsip ini sangat diperlukan untuk memperbaiki struktur organisasi yang mengelola pencegahan pencemaran air sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat.

• **Contoh Penerapan Administrasi**

Program Citarum Harum adalah contoh nyata penerapan administrasi lingkungan di Indonesia (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, n.d.). Pemerintah menerapkan fungsi administrasi mulai dari:

a. Perencanaan (*Planning*)

Menyusun rencana revitalisasi Sungai Citarum melalui (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, n.d.)

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Membentuk Satgas Citarum Harum dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, komunitas, dan dunia usaha.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Melakukan pembersihan sungai, rehabilitasi lahan, dan edukasi masyarakat.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Melakukan monitoring rutin terhadap kualitas air sungai dan mengevaluasi kinerja program.

2. Publik

Kata "publik" merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris, yakni "*public*." Secara general, kata ini merujuk kepada keseluruhan masyarakat. Dalam ilmu Administrasi Publik, istilah publik merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan umum, berbagi ruang kehidupan sosial, dan menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) atau sasaran (*targets*) dari kebijakan dan pelayanan pemerintah. Secara umum, sebagian besar akademisi dan masyarakat akan menggunakan istilah "publik" dalam arti "segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat banyak" (Reza, 2016). Menurut Keppler dalam (Reza, 2016) mengemukakan bahwa otoritas politik yang membentuk sebuah organisasi menentukan tingkat publicness atau penentuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi publik. Untuk mencapai tujuan mereka, pemerintah harus membuatnya dengan surat keputusan resmi dan keputusan musyawarah.

3. Administrasi Publik

Cabang ilmu sosial administrasi publik mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah dibuat, diimplementasikan, dan dikelola untuk melayani kepentingan masyarakat (publik). Administrasi Publik menurut Caiden dalam (Ariyani et al., 2016) mengatakan bahwa seluruh kegiatan administrasi publik berkaitan dengan segenap urusan publik, sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik disebut administrasi publik.

4. Administrasi Lingkungan

Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, konsep administrasi lingkungan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola, merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan bagaimana tindakan manusia berdampak pada lingkungan alam (Raja Plastik Indonesia, 2024). Pengelolaan sumber daya alam, limbah, air, dan udara, serta pencegahan polusi dan pelestarian habitat alam adalah semua contohnya. Selain itu, ada banyak pihak yang terlibat dalam administrasi lingkungan, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mengimbangi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Administrasi lingkungan adalah konsep yang paling spesifik kaitannya dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Administrasi lingkungan mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian dampak manusia terhadap lingkungan. Kaitannya dengan penelitian yang sedang peneliti kaji ialah karena pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat adalah masalah akibat buruknya pengelolaan limbah, maka administrasi lingkungan menjadi pendekatan utama untuk merancang strategi kebijakan pencegahan pencemaran yang terstruktur dan berkelanjutan.

- **Pentingnya Administrasi Lingkungan untuk Penelitian ini**

Administrasi lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks penelitian ini karena:

- a. **Mengatur Upaya Pencegahan Pencemaran Secara Terstruktur**

Administrasi lingkungan memungkinkan setiap kegiatan pencegahan pencemaran air Sungai Citarum dijalankan melalui proses yang sistematis: mulai dari perencanaan (*planning*) pencegahan limbah, pengorganisasian pihak terkait, pelaksanaan program di lapangan, hingga pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kualitas air sungai.

b. Menynergikan Peran Pemerintah, Industri dan Masyarakat

Permasalahan pencemaran Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Administrasi lingkungan berfungsi membangun koordinasi dan kolaborasi antar berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, industri di sekitar sungai, komunitas lokal, dan masyarakat umum, agar semua pihak terlibat aktif dalam upaya perlindungan lingkungan.

c. Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan

Walaupun sudah ada kebijakan seperti Program Citarum Harum berdasarkan (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, n.d.), kenyataannya implementasinya di daerah belum cukup optimal. Dengan administrasi lingkungan yang baik, hambatan dalam implementasi seperti lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi, dan tidak konsistennya tindakan lapangan dapat diminimalkan.

d. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi

Administrasi lingkungan memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan keterbukaan informasi (transparansi) dalam pengelolaan Sungai Citarum. Masyarakat dapat mengawasi jalannya program dan pemerintah wajib memberikan laporan hasil pengelolaan lingkungan.

e. Menjamin Keberlanjutan Program Pelestarian Lingkungan

Tanpa administrasi lingkungan yang kuat, upaya pencegahan pencemaran Sungai Citarum berisiko hanya bersifat jangka pendek atau seremonial saja. Di sini administrasi lingkungan membantu merancang program yang berkelanjutan dan dapat terus berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

5. Strategi

Menurut Rangkuti (2002) dalam (Mohamad & Niode, 2020) mengatakan bahwa strategi membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya dan menetapkan prioritas alokasi sumber daya. Meskipun demikian, David (2006) dalam (Mohamad & Niode, 2020) menyatakan bahwa strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang secara kolektif dan dikombinasikan. Strategi ini akan menghasilkan keunggulan dengan meminimalkan hambatan yang dimiliki pesaing.

Kaitannya dengan penelitian yang sedang peneliti kaji ialah permasalahan pencemaran Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan normatif. Diperlukan strategi kebijakan administrasi lingkungan yang spesifik dan realistis, untuk mengatasi kompleksitas sumber pencemaran seperti limbah industri, domestik, dan pertanian. Strategi ini harus melibatkan perencanaan matang, alokasi sumber daya yang tepat, program aksi nyata, dan tahapan pelaksanaan yang terukur. Setiap fungsi administrasi (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dalam penelitian ini juga dibungkus dalam suatu kerangka strategi agar pelaksanaannya sistematis dan mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi yang baik, program seperti Citarum Harum hanya akan bersifat jangka pendek atau seremonial. Strategi kebijakan administrasi lingkungan harus dirancang untuk menjamin keberlanjutan upaya pencegahan pencemaran, bahkan setelah masa jabatan kepala daerah atau pejabat berganti.

Penelitian Terdahulu

Meninjau hasil penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti dalam mencari perbandingan yang selanjutnya dapat digunakan untuk mencari daya cipta baru sehingga dapat menciptakan orisinalitas dari suatu penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang sudah peneliti ringkas sebagai berikut:

a. Muhammad Fadhil Imansyah (2012). "Studi Umum Permasalahan dan Solusi DAS Citarum serta Analisis Kebijakan Pemerintah".

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait kerusakan lingkungan hulu DAS Citarum, pencemaran dan pengelolaan kebijakan yang lemah. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis permasalahan lingkungan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan DAS Citarum. Objek penelitian ini di DAS Citarum (terutama di kawasan hulu seperti Kabupaten Bandung). Penelitian ini menggunakan teori Analisis Kebijakan Publik oleh William N. Dunn (1994) sebagai pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya pendekatan *top-down*.

Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah jika penelitian Muhammad Fadhil Imansyah berfokus pada analisis konservasi kebijakan hulu DAS, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada strategi administrasi untuk pencegahan pencemaran air di tingkat kabupaten.

b. Tri Setiady (2024). "Pencegahan Pencemaran Air Sungai Citarum Akibat Limbah Industri".

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait limbah industri yang menyebabkan pencemaran parah di DAS Citarum. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji faktor penyebab pencemaran industri dan upaya pencegahannya. Objek penelitian ini di Sungai Citarum yang tercemar limbah industri. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian dokumen. Dalam penelitian ini, teori perlindungan lingkungan digunakan: Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas air memburuk, maka diperlukan pengawasan dan penindakan lebih ketat.

Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah jika penelitian Tri Setiady berfokus pada analisis hukum terhadap industri, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada penguatan administrasi lingkungan yang strategis.

c. Dhita Amelia (2024). "Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Air di Sungai Citarum, Jawa Barat".

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait lemahnya implementasi hukum pencemaran lingkungan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis regulasi dan implementasi penegakan hukum lingkungan. Objek penelitian ini mengenai regulasi hukum pencemaran Sungai Citarum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah Teori Hukum Lingkungan: Prinsip Asas Wawasan Lingkungan dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi sudah memadai, namun implementasi dan penegakan hukum di lapangan masih lemah.

Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah jika penelitian Dhita Amelia berfokus pada regulasi hukum, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada strategi administrasi preventif.

d. Maria Agustine (2021). "Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Daerah Aliran Sungai Citarum".

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait lemahnya sistem pengendalian pencemaran air DAS Citarum. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis upaya pengendalian pencemaran air dan peran masyarakat. Objek penelitian ini di DAS Citarum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah Pengelolaan DAS dan Konservasi Air berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah jika penelitian Maria Agustine berfokus pada pengelolaan DAS secara keseluruhan, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada strategi administrasi di wilayah administratif tertentu (Kabupaten Bandung Barat).

e. Yayan Andri & Yaya Mulyana Abdul Aziz (2021). "Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum di Kabupaten Bandung".

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait pencemaran berat di Sungai Citarum akibat limbah industri dan domestik; efektivitas program masih rendah. Studi ini bertujuan untuk mempelajari strategi kebijakan lingkungan Program Citarum Harum. Objek penelitian ini mengenai program Citarum Harum di daerah Kabupaten Bandung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah Teori Strategi: Effendy (2003), Chandler (1962), Quinn (1980), dan Teori Kebijakan Publik: James E. Anderson (1979), L.N. Gerston (1997). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Citarum Harum integratif lintas sektor, tetapi keberlanjutan program pasca-2025 masih menjadi tantangan.

Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah jika penelitian Yayan Andri & Yaya Mulyana Abdul Aziz berfokus pada kebijakan strategis, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada strategi administrasi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan (<i>novelty</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)
Muhammad Fadhil Imansyah (2012)	"Studi Umum Permasalahan dan Solusi DAS Citarum serta Analisis Kebijakan Pemerintah".	Dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti kaji sama-sama menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah	Penelitian oleh Muhammad Fadhil Imansyah berfokus pada permasalahan konservasi lahan hulu DAS Citarum dan penguatan

		dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan DAS Citarum, dan juga sama-sama membahas pengelolaan sumber daya air.	kebijakan publik, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada strategi administrasi lingkungan untuk pencegahan pencemaran air di Kabupaten Bandung Barat. Di samping itu, penelitian oleh Muhammad Fadhil Imansyah juga mengkaji kebijakan konservasi secara umum, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji lebih spesifik pada strategi teknis administrasi preventif di tingkat kabupaten.
Tri Setiady (2024)	"Pencegahan Pencemaran Air Sungai Citarum	Dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang	Penelitian oleh Tri Setiady berfokus pada analisis faktor

	Akibat Limbah Industri".	peneliti kaji sama-sama membahas terkait pencemaran Sungai Citarum akibat limbah industri. Dan juga sama-sama mengkaji permasalahan terkait pencemaran berat dan kebutuhan akan solusi.	penyebab pencemaran dan penegakan hukum berdasarkan UU PPLH, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada merancang strategi administrasi untuk pencegahan pencemaran, bukan hanya melihat akibat pencemaran. Di samping itu, penelitian oleh Tri Setiady juga menekankan aspek analisis yuridis, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji lebih banyak menggunakan administrasi publik dan strategi POAC.
Dhita Amelia (2024)	"Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Air di	Dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang	Penelitian oleh Dhita Amelia berfokus pada

	Sungai Citarum, Jawa Barat".	peneliti kaji sama-sama menyoroti masalah lemahnya implementasi penanganan pencemaran Citarum. Dan juga sama-sama menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai dasar hukum.	penegakan hukum dan aspek regulasi atas pencemaran air, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada administrasi lingkungan preventif melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Di samping itu, penelitian oleh Dhita Amelia juga mengkaji sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada membangun strategi pencegahan administrasi
--	------------------------------	--	--

			sebelum pelanggaran terjadi.
Maria Agustine (2021)	"Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Daerah Aliran Sungai Citarum".	Dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti kaji sama-sama membahas pencemaran air di DAS Citarum. Dan juga sama-sama menyoroti perlunya pengelolaan limbah dan partisipasi masyarakat.	Penelitian oleh Maria Agustine berfokus pada analisis sistem pengendalian pencemaran DAS Citarum secara umum (dari hulu hingga hilir), sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus khusus di Kabupaten Bandung Barat. Di samping itu, penelitian oleh Maria Agustine juga lebih menekankan pada pengelolaan teknis pengendalian DAS, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji menekankan pada strategi

			administrasi lingkungan (POAC) untuk mencegah pencemaran.
Yayan Andri & Yaya Mulyana Abdul Aziz (2021)	"Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum di Kabupaten Bandung"	Dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti kaji sama-sama membahas pencemaran Sungai Citarum. Sama-sama menggunakan pendekatan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan. Dan juga sama-sama menyoroti pentingnya kolaborasi antar-instansi dan masyarakat.	Penelitian oleh Yayan Andri & Yaya Mulyana Abdul Aziz berfokus pada strategi kebijakan lingkungan di level kabupaten secara umum, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada strategi administrasi lingkungan berbasis POAC di Kabupaten Bandung Barat. Di samping itu, penelitian oleh Yayan Andri & Yaya Mulyana Abdul Aziz juga membahas kelanjutan program Citarum Harum, sedangkan

			penelitian penelitian yang sedang peneliti kaji berfokus pada strategi pencegahan pencemaran melalui administrasi.
--	--	--	---

Sumber: Hasil penelitian, diolah oleh peneliti (2025)

Adapun yang menjadi kata kunci dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu di atas adalah bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih meneliti aspek kebijakan, pengendalian sistem, penegakan hukum, dan konservasi lingkungan secara umum. Penelitian oleh (Andri & Aziz, 2021) lebih fokus pada strategi kebijakan lingkungan, (Agustine, 2021) lebih focus pada pengendalian sistem pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS), (Amelia, 2024) lebih focus pada penegakan regulasi hukum lingkungan, (Setiady, 2024) lebih fokus pada analisis faktor pencemaran industri, serta (Imansyah, 2012) lebih focus pada analisis kebijakan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode deskriptif untuk analisis, dan jenisnya adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Menurut Moleong (2009) dalam (Andri & Aziz, 2021) mengemukakan penelitian kualitatif dianggap sangat tepat untuk Penelitian Strategi Kebijakan Administrasi Lingkungan karena merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, lebih jauh Sukidin (2003) dalam (Andri & Aziz, 2021) mengatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai melalui teknik statistik atau metode kualifikasi lainnya.

Peneliti memilih metode kualitatif ini karena diharapkan dapat mengumpulkan data asli dan mempelajari masalah peneliti tentang strategi kebijakan administrasi lingkungan untuk mencegah pencemaran air sungai Citarum Kabupaten Bandung Barat. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh data dan hasil yang diharapkan dan untuk mengkaji fenomena pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data skunder termasuk kegiatan penelitian seperti membaca berbagai buku dan literatur lainnya; karya ilmiah, dokumen, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, seperti strategi kebijakan lingkungan dan pemerintahan, serta melalui analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, terutama pada (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, n.d.) tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, juga melalui studi literatur dari hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan lembaga terkait, serta artikel-artikel ilmiah dan berita kredibel. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti memberikan gambaran tentang fakta yang ada dan menganalisisnya untuk menemukan pola atau hubungan yang relevan dengan upaya pencegahan pencemaran menggunakan pendekatan administrasi lingkungan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Fokus wilayah ini karena Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang mengalami tingkat pencemaran air dan lingkungan yang cukup tinggi akibat aktivitas domestik, industri kecil-menengah, dan rendahnya strategi pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu April 2025 dengan studi literatur dari beberapa dekade tahun terakhir sebagai perbandingan kondisi di lapangan. Selama periode ini, peneliti mengumpulkan data sekunder, menganalisis dokumen, dan menyusun hasil penelitian.

Tabel 3
Tahapan Kegiatan Penelitian

No	Tahapan	Kegiatan
1	Persiapan	Pengumpulan penelitian terdahulu, permasalahan yang akan dikaji, persiapan judul, data-data, referensi dan penyusunan rencana penelitian
2	Studi Literatur	Studi literatur tentang strategi kebijakan lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018, serta beberapa laporan, artikel, karya ilmiah, dokumen, dan arsip dan pemerintahan, serta melalui analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, dan juga hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan lembaga terkait, dan berita kredibel
3	Analisis Data	Menganalisis berdasarkan tema-tema utama dari penelitian ini
4	Penyusunan Laporan	Penyusunan artikel penelitian
5	Finalisasi	Review dan penyempurnaan hasil penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 4
Teknik Pengumpulan Data

No	Teknik Pengumpulan Data	Kegiatan
1	Studi Literatur	Studi dari dokumen Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 serta beberapa laporan, artikel, karya ilmiah, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian strategi kebijakan lingkungan dan pemerintahan, serta melalui analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, dan juga hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan lembaga terkait, dan berita kredibel
2	Studi Dokumen	Menelaah regulasi, peraturan perundang-undangan, laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah terkait pengelolaan Sungai Citarum, data analisis pencemaran air, dan dokumen berita lainnya.
3	Observasi Nonpartisipan (dalam Studi Literatur)	Mengamati kondisi pencemaran berdasarkan laporan visual, data publikasi, dan dokumentasi kegiatan pemerintah atau komunitas terkait perbaikan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 5
Teknik Analisa Data

No	Teknik Analisa	Kegiatan
1	Reduksi Data	Memilih data dan referensi yang relevan dengan tema administrasi lingkungan dan pencemaran Sungai Citarum.
2	Kategorisasi	Mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam konteks administrasi lingkungan oleh George R. Terry
3	Interpretasi Data	Menganalisis hubungan antara data referensi yang ditemukan dengan konsep-konsep teori POAC oleh George R. Terry, prinsip administrasi, dan strategi pencegahan pencemaran.
4	Penarikan Kesimpulan	Menyimpulkan hasil analisis untuk memberikan gambaran tentang strategi kebijakan administrasi lingkungan dalam pencegahan pencemaran air di Kabupaten Bandung Barat.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Teknik ini mengikuti prosedur ilmiah kualitatif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam (Kresna, 2019) yang menunjukkan bahwa dalam model interaktif, pengumpulan data, pengurangan data, penampilan data, dan verifikasi hasil. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur ini, diharapkan penelitian ini

dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk penguatan strategi kebijakan administrasi lingkungan yang lebih efektif dalam mengatasi pencemaran air Sungai Citarum di tingkat daerah.

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis literatur. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi strategi kebijakan administrasi lingkungan yang dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat. Selama pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Tahap awal penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan. Literatur utama yang dikaji meliputi (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, n.d.) tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, dokumen-dokumen Program Citarum Harum, laporan kualitas air dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Imansyah, 2012), (Setiady, 2024), (Amelia, 2024), (Agustine, 2021), dan (Andri & Aziz, 2021). Selain itu, sejumlah laporan, artikel, karya ilmiah, dokumen, dan arsip yang terkait dengan penelitian strategi kebijakan lingkungan dan pemerintahan, serta melalui analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, dan juga hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan lembaga terkait, dan berita kredibel juga dijadikan sumber informasi pendukung.

Setelah tahap pengumpulan literatur, penelitian dilanjutkan dengan studi dokumen. Peneliti mengkaji berbagai dokumen kebijakan, evaluasi implementasi Program Citarum Harum, data pengukuran kualitas air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat, laporan inspeksi industri, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di wilayah penelitian. Studi dokumen ini bertujuan untuk memperoleh gambaran konkret mengenai implementasi administrasi lingkungan dan efektivitas strategi pencegahan pencemaran yang telah dilakukan.

Peneliti menggunakan pendekatan fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*) yang diusulkan oleh George R. Terry (1977) untuk menganalisis data. Peneliti menggunakan teori manajemen dari George R. Terry (1977) untuk mengkaji administrasi lingkungan dengan pendekatan empat fungsi manajemen (POAC):

1. Planning:

Menganalisis sejauh mana perencanaan program pengendalian pencemaran berbasis data lokal dilakukan.

2. Organizing:

Menilai struktur organisasi pengelola lingkungan, keterlibatan stakeholder, dan pembagian tugas.

3. Actuating:

Mengkaji pelaksanaan program di lapangan, termasuk kampanye kebersihan sungai dan pembangunan IPAL.

4. Controlling:

Mengkaji sistem pengawasan, monitoring kualitas air, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan strategi kebijakan administrasi lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, dan juga peneliti dapat menilai sejauh mana perencanaan pencegahan pencemaran telah disusun berbasis kebutuhan lokal, bagaimana struktur organisasi pengelolaan lingkungan dibentuk dan dioperasikan, bagaimana pelaksanaan program-program pengendalian di lapangan, serta bagaimana pengawasan terhadap pencemaran sungai dilakukan secara berkelanjutan. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan fungsi-fungsi POAC sebagai landasan dari administrasi pengelolaan, kemudian menginterpretasikan keterkaitan antar data untuk menjawab tujuan penelitian.

Sepanjang proses penelitian, peneliti menghadapi tantangan seperti terbatasnya ketersediaan data spesifik untuk wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat, mengingat sebagian besar laporan cenderung mengkaji Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum secara keseluruhan. Namun, dengan mempertimbangkan konteks sosial, geografis, dan administratif Kabupaten Bandung Barat, masalah ini dapat diselesaikan dengan triangulasi data dari berbagai sumber.

Secara keseluruhan, kegiatan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana strategi kebijakan administrasi lingkungan berbasis fungsi POAC oleh teori George R. Terry dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas strategi pencegahan pencemaran air di Sungai Citarum, khususnya pada wilayah Kabupaten Bandung Barat. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah sekaligus masukan praktis bagi penguatan program pengelolaan lingkungan di tingkat daerah.

Temuan-Temuan Selama Penelitian

1. Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat masih mengalami pencemaran berat akibat limbah industri dan domestik.
2. Implementasi Program Citarum Harum di tingkat daerah belum optimal, banyak ditemukan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.
3. Fungsi administrasi lingkungan, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan, masih lemah.
4. Koordinasi antarinstansi pemerintah daerah masih rendah dan belum efektif mendorong partisipasi masyarakat.
5. Ada peluang penguatan strategi kebijakan administrasi berbasis POAC untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 6
Pertanyaan Penelitian dan Hasil Temuan

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Temuan
1	Bagaimana kondisi pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat saat ini?	Dalam kondisi yang masih tercemar, DAS Citarum mengandung logam berat, seperti kadar besi terlarut maksimal 23,4 kg/hari, mangan (Mn) 8,29 kg/hari, tembaga (Cu) 51,1 kg/hari, dan seng (Zn) 57,3 kg/hari (Setiady, 2024). Juga ditemukannya obat parasetamol dan banyak bahan aktif yang mencemari Sungai Citarum, termasuk nikotin, carbamazepine, yang biasa digunakan untuk epilepsi, dan metformin, yang biasa digunakan untuk diabetes (Ramdhani & Gabrillin, 2022).
2	Bagaimana strategi kebijakan administrasi lingkungan, khususnya fungsi POAC, diterapkan?	Kenyataannya di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, penerapan strategi kebijakan administrasi lingkungan belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih banyak ditemukan inkonsistensi dalam pelaksanaan program, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kolaborasi lintas sektor yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan dari program tersebut. Di samping itu, implementasi teori George R. Terry (1977) terkait fungsi POAC, seperti halnya <i>Planning</i> masih kurang akurat, <i>Organizing</i> belum membagi tugas lintas

		instansi dengan baik, <i>Actuating</i> masih parsial, <i>Controlling</i> belum konsisten.
3	Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan strategi kebijakan administrasi lingkungan?	• Faktor Penghambat: Rendahnya koordinasi, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat. • Faktor Pendukung: Adanya regulasi seperti (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, n.d.), dan kesadaran baru masyarakat melalui Program Citarum Harum.
4	Bagaimana peran pemerintah daerah, industri, dan masyarakat?	Pemerintah daerah sudah mulai bertindak, tetapi koordinasi masih lemah. Terbatasnya kapasitas pengawasan lingkungan dari pihak pemerintah daerah memperburuk kondisi pencemaran yang ada. Di samping itu, banyak bisnis juga tidak memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
5	Apa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas administrasi lingkungan?	Diperlukan perencanaan berbasis data, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pengawasan, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas lingkungan. Di samping itu, rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas administrasi

		lingkungan ialah dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret dan berbasis administrasi publik dalam mendukung pemulihan dan pelestarian kualitas air Sungai Citarum, khususnya di kawasan Kabupaten Bandung Barat.
--	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 7

Keterkaitan dengan Teori George R. Terry (POAC)

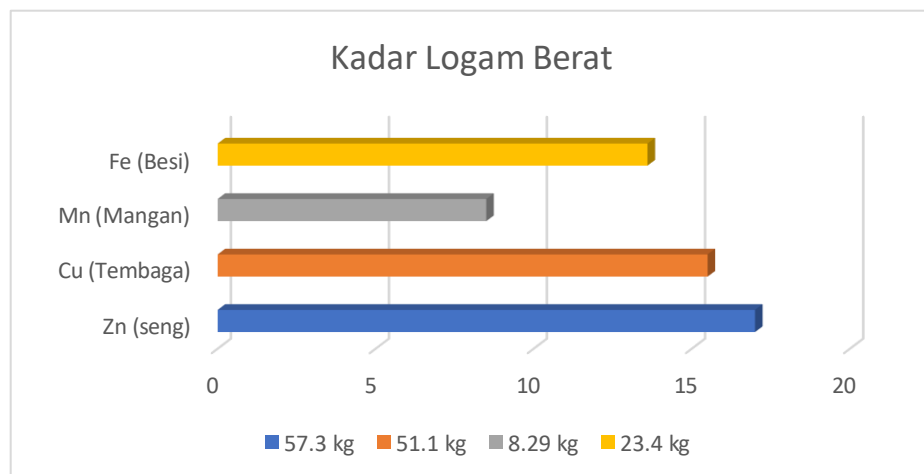
No	Fungsi POAC	Temuan di Lapangan	Analisis
1	<i>Planning</i>	Rencana pengelolaan DAS Citarum belum berbasis kebutuhan lokal yang spesifik di Kabupaten Bandung Barat	Perlu menganalisis kebutuhan berbasis data pencemaran lokal dan proyeksi jangka panjang.
2	<i>Organizing</i>	Tumpang tindih tugas antar-instansi, dan koordinasi yang belum optimal.	Perlu penyusunan struktur kerja yang jelas dan pembagian peran fungsional antar-instansi.
3	<i>Actuating</i>	Program di lapangan bersifat tidak teratur dan tidak berkelanjutan.	Diperlukan penggerakan yang sistematis berbasis perencanaan jangka menengah hingga jangka panjang.
4	<i>Controlling</i>	Monitoring terkait kualitas air yang tidak rutin, dan sanksi hukum yang masih	Perlu penguatan sistem monitoring evaluatif dan sanksi hukum dan regulasi yang tegas terhadap

		lemah terhadap pencemaran lingkungan.	pelanggar pencemaran lingkungan.
--	--	---------------------------------------	----------------------------------

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Gambar 1

Grafik Kondisi Sungai Citarum Kabupaten Bandung Barat



Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi lingkungan berbasis POAC perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pencemaran air di Kabupaten Bandung Barat. Strategi kebijakan administrasi yang lebih terstruktur dan kolaboratif harus segera diimplementasikan agar program-program seperti Citarum Harum tidak hanya menjadi wacana, tetapi berdampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Meskipun berbasis studi literatur, penelitian ini memberikan gambaran utuh tentang kondisi dan strategi kebijakan administrasi lingkungan dalam pencegahan pencemaran Sungai Citarum.

Diskusi

Penelitian ini mengkaji strategi kebijakan administrasi lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pencemaran air di wilayah tersebut masih dalam kategori berat, dengan pencemaran logam berat seperti besi (Fe), mangan (Mn), tembaga (Cu), dan seng (Zn) yang terdeteksi di atas ambang batas. Selain logam berat, ditemukan pula zat-zat aktif farmasi seperti parasetamol, metformin, nikotin, dan antibiotik di aliran sungai. Temuan ini sejalan dengan laporan Dinas Lingkungan Hidup dan studi (Ramdhani & Gabrillin, 2022) yang mengungkapkan degradasi kualitas air Sungai Citarum yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam konteks administrasi lingkungan, penerapan strategi berdasarkan empat fungsi POAC dari George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023) belum terlaksana secara optimal di Kabupaten Bandung Barat. Pada fungsi *Planning* (Perencanaan), rencana pengelolaan lingkungan daerah belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan dan kondisi spesifik lokal. Perencanaan cenderung generik dan belum mempertimbangkan data aktual tingkat pencemaran di tiap kecamatan. Hal ini memperlemah fondasi upaya pencegahan, sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry, bahwa perencanaan yang matang adalah langkah awal dalam mencapai tujuan yang efektif.

Selanjutnya, pada fungsi *Organizing* (Pengorganisasian), ditemukan permasalahan dalam tumpang tindih tugas antarinstansi. Struktur pengelolaan lingkungan belum terkoordinasi dengan baik, menyebabkan pelaksanaan program menjadi kurang efisien. Berdasarkan prinsip administrasi klasik oleh Gulick dan Urwick (1937) dalam (Wicaksono, 2013) tentang pentingnya spesialisasi fungsional dan rentang kendali yang efektif, lemahnya organisasi ini berkontribusi pada kegagalan pengelolaan lingkungan di tingkat daerah.

Dalam aspek *Actuating* (Pelaksanaan/Pengarahan), pelaksanaan program seperti Citarum Harum di tingkat Kabupaten Bandung Barat bersifat jangka pendek dan tidak konsisten. Kampanye kebersihan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dilakukan secara parsial tanpa program berkelanjutan yang terencana. Padahal, sebagaimana teori George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023) menegaskan bahwa pelaksanaan yang efektif harus berlandaskan motivasi, koordinasi, dan integrasi seluruh unsur organisasi.

Fungsi *Controlling* (Pengawasan) juga menjadi salah satu titik lemah. Monitoring kualitas air Sungai Citarum ini tidak dilakukan secara berkala dan sistematis. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga masih lemah, hal ini menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelaku pencemaran lingkungan. Padahal, prinsip dasar *controlling* menurut George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023) adalah pengamatan, evaluasi, dan koreksi berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana.

Pada temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian terdahulu seperti yang disampaikan oleh (Andri & Aziz, 2021) yang menyatakan bahwa meskipun Program Citarum Harum sudah dirancang secara strategis, implementasinya di daerah masih banyak menemui hambatan struktural dan administratif. Selain itu, hasil penelitian terdahulu dari (Agustine, 2021) juga menunjukkan bahwa pentingnya sistem pengendalian pencemaran yang lebih terstruktur, yang relevan dengan kebutuhan di DAS Citarum Kabupaten Bandung Barat saat ini.

Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan strategi kebijakan administrasi lingkungan ini adalah rendahnya koordinasi lintas sektor, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini memperburuk efektivitas administrasi lingkungan yang seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah. Sebaliknya, faktor pendukungnya adalah keberadaan regulasi nasional seperti (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, n.d.) yang meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat berkat program-program edukasi lingkungan.

Adapun peran pemerintah daerah, industri, dan masyarakat dalam mendukung strategi kebijakan administrasi lingkungan dinilai masih belum maksimal. Pemerintah daerah sudah mulai berupaya melalui kampanye kebersihan dan inspeksi. Namun, koordinasinya dengan industri dan komunitas masyarakat masih perlu diperkuat. Industri banyak yang belum memenuhi standar IPAL, sementara partisipasi masyarakat masih terbatas pada kegiatan insidental (sewaktu-waktu).

Melalui hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa administrasi lingkungan berbasis POAC memiliki potensi besar untuk memperkuat upaya pencegahan pencemaran di DAS Citarum di Kabupaten Bandung Barat, asalkan setiap fungsi dari keempat POAC dilaksanakan secara terintegrasi dan konsisten. Dengan demikian, maka strategi ke depan perlu diarahkan pada penguatan perencanaan berbasis data lokal, restrukturisasi organisasi lintas sektor, penyusunan program pelaksanaan berkelanjutan, dan pengawasan berbasis komunitas.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun administrasi lingkungan yang bukan hanya responsif terhadap pencemaran, tetapi juga adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis di sepanjang DAS Citarum. Hal ini sejalan dengan pandangan administrasi publik *modern* yang menempatkan tata kelola lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.

Analisis POAC dalam Strategi Kebijakan Administrasi Lingkungan

1. Analisis *Planning* di Kabupaten Bandung Barat

Perencanaan pencegahan pencemaran air di Kabupaten Bandung Barat saat ini belum sepenuhnya berbasis pada data lokal yang akurat. Dokumen perencanaan, seperti Rencana Aksi Program Citarum Harum, lebih bersifat umum dan belum mengakomodasi kondisi riil di tiap kecamatan. Seharusnya, berdasarkan teori George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023), perencanaan harus didasarkan pada pengumpulan informasi yang akurat, analisis kebutuhan lokal, serta penetapan tujuan spesifik yang dapat diukur. Namun dalam praktiknya, kegiatan perencanaan masih banyak yang bersifat *top-down*, mengikuti pola instruksi dari pemerintah provinsi atau pusat, tanpa adaptasi signifikan terhadap kondisi spesifik di Kabupaten

Bandung Barat. Hal ini membuat prioritas program tidak sesuai, seperti pembangunan IPAL yang tidak merata dan program edukasi lingkungan yang kurang menjangkau di daerah kritis.

2. Analisis *Organizing* di Kabupaten Bandung Barat

Fungsi *organizing* atau pengorganisasian dalam strategi kebijakan administrasi lingkungan masih menghadapi kendala serius. Koordinasi antar-instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satgas Citarum Harum, Pemerintah Kabupaten, dan lembaga komunitas masih belum berjalan optimal. Struktur organisasi pencegahan pencemaran masih terfragmentasi, tanpa sistem pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Menurut prinsip administrasi oleh George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023), *organizing* harus mencakup pembentukan struktur fungsional, pembagian tugas rasional, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Di Kabupaten Bandung Barat, lemahnya *organizing* tercermin dari adanya tumpang tindih program antarinstansi dan kurangnya sinergi dalam pengelolaan limbah industri dan domestik. Akibatnya, meskipun banyak program diluncurkan, *output* di lapangan masih belum maksimal.

3. Analisis *Actuating* di Kabupaten Bandung Barat

Dalam tahap *actuating* atau penggerakan pelaksanaan, terlihat bahwa program-program pengendalian pencemaran seperti gerakan bersih sungai, pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, atau reboisasi daerah sempadan sungai, belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023) menekankan bahwa *actuating* melibatkan pemberian motivasi, pengarahan, dan pengembangan komunikasi yang efektif. Namun pada kenyataannya, kegiatan pelaksanaan di Kabupaten Bandung Barat masih bersifat seremonial atau tidak konsisten, bergantung pada momentum tertentu seperti saat ada *event* nasional atau kunjungan pejabat. Kurangnya motivasi internal dari aparat daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program lingkungan juga mengindikasikan bahwa fungsi *actuating* belum berjalan optimal. Maka dari itu,

edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat sekitar bantaran sungai masih sangat diperlukan agar perubahan perilaku terjadi secara masif.

4. Analisis *Controlling* di Kabupaten Bandung Barat

Fungsi *controlling* atau pengawasan dalam administrasi lingkungan juga menunjukkan kelemahan yang cukup serius. Sistem monitoring kualitas air dan inspeksi industri di sekitar Sungai Citarum belum dilaksanakan secara rutin dan sistematis. George R. Terry (1977) dalam (Wijayanti & Wicaksana, 2023) menjelaskan bahwa *controlling* mencakup pengamatan berkelanjutan terhadap kinerja, perbandingan antara hasil dengan standar yang ditetapkan, serta tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Dalam kasus Kabupaten Bandung Barat, meskipun ada regulasi tentang pengawasan lingkungan, implementasinya masih lemah. Banyak industri kecil yang membuang limbah tanpa pengolahan dan tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Selain itu, hasil evaluasi kualitas air seringkali tidak dijadikan sebagai dasar untuk merancang perbaikan kebijakan. Maka dengan itu, pengawasan yang lemah ini bisa berdampak langsung terhadap kegagalan dalam menjaga kualitas air sungai, menyebabkan kondisi Sungai Citarum tetap dalam kategori tercemar berat.

Melalui analisis terhadap empat fungsi POAC, dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan administrasi lingkungan dalam pencegahan pencemaran Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat masih perlu banyak perbaikan. Penguatan diperlukan pada aspek perencanaan berbasis data lokal yang akurat, pengorganisasian lintas instansi yang lebih jelas dan sinergis, pelaksanaan program yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan berkala yang tegas dan konsisten. Maka dengan demikian, penerapan fungsi POAC secara penuh dan efektif menjadi kunci untuk menciptakan administrasi lingkungan yang mampu menurunkan tingkat pencemaran air secara nyata di masa yang akan mendatang.

Kesimpulan

Penelitian mengenai "Strategi Kebijakan Administrasi Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat" memberikan pengalaman berharga bagi peneliti dalam mengembangkan keterampilan akademik dan analitis, khususnya dalam memahami hubungan antara teori administrasi dengan realitas permasalahan pencemaran air di suatu daerah. Melalui metode kualitatif berbasis studi literatur, peneliti mampu mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, menganalisis kebijakan publik, menginterpretasikan data sekunder, dan menghubungkannya dengan konsep administrasi berbasis fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) sebuah teori yang dikemukakan oleh George R. Terry (1977). Pengalaman ini juga meningkatkan wawasan peneliti tentang pentingnya koordinasi lintas sektor, perlunya perencanaan berbasis data, dan tantangan nyata dalam implementasi administrasi lingkungan di tingkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih mengalami pencemaran berat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kadar logam berat seperti seng, tembaga, mangan, besi, dll, serta ditemukannya zat aktif farmasi di aliran sungai. Temuan ini memperjelas bahwa pencemaran air di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan yang serius.

Strategi kebijakan administrasi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat, khususnya dalam penerapan fungsi POAC, belum berjalan secara optimal. Pada fungsi perencanaan, masih ditemukan bahwa rencana pengelolaan lingkungan belum berbasis kebutuhan lokal yang spesifik. Pada fungsi pengorganisasian, terlihat adanya tumpang tindih tugas antar-instansi dan kurangnya koordinasi yang efektif. Pada fungsi pelaksanaan, program-program yang dijalankan masih bersifat seremonial dan kurang berkelanjutan. Sedangkan pada fungsi pengawasan, monitoring terhadap kualitas air sungai dan penegakan hukum terhadap pelanggar pencemaran masih lemah.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan strategi kebijakan administrasi lingkungan meliputi lemahnya koordinasi antar-instansi, rendahnya tingkat pengawasan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Di sisi lain, faktor pendukungnya adalah adanya kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018, dan meningkatnya kesadaran masyarakat melalui program edukasi lingkungan. Peran pemerintah daerah, industri, dan masyarakat dalam mendukung efektivitas administrasi lingkungan masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi internal, sektor industri perlu mematuhi standar pengelolaan limbah, dan masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan bagi pemerintah adalah memperkuat perencanaan berbasis data lokal, membangun struktur organisasi yang lebih efektif dan jelas, menggerakkan pelaksanaan program lingkungan secara berkelanjutan, serta memperketat pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran pencemaran. Adapun rekomendasi untuk masyarakat, perlu ditingkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif dalam menjaga kebersihan sungai melalui program komunitas berbasis lingkungan. Adapun rekomendasi peneliti yang akan datang disarankan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang model implementasi kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta melakukan studi lapangan langsung untuk melengkapi analisis yang berbasis studi literatur ini.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun strategi kebijakan administrasi lingkungan yang adaptif, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mendukung upaya penyelamatan Sungai Citarum, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang sangat tinggi pencemaran air sungainya. Maka dengan demikian, hal ini merupakan bagian integral dari menjaga keseimbangan ekologi dan kelangsungan hidup masyarakat dan generasi yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Agustine, M. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Daerah Aliran Sungai Citarum. *Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang* /, 5(1), 2620–5297. file:///C:/Users/acer/Downloads/Maria%20Agustine.pdf
- Amelia, D. (2024). Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Air di Sungai Citarum, Jawa Barat. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(02), 88–96. file:///C:/Users/acer/Downloads/Dhita%20Amelia.pdf
- Andri, Y., & Aziz, Y. (2021). Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 3(1), 114–124. file:///C:/Users/acer/Downloads/Yayan%20Andri%20&%20Yaya%20Mulyana%20Abdul%20Aziz.pdf
- Ariyani, A., Mindarti, L., & Nuh, M. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gebrakan Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(4), 156–161. file:///C:/Users/acer/Downloads/Arik%20Ariyani,%20Lely%20Indah%20Mindarti,%20Mohammad%20Nuh.pdf
- Bandung Bergerak. (2024, December 31). *Akhir Citarum Harum*. Bandungbergerak.id. <https://bandungbergerak.id/foto/detail/293/akhir-citarum-harum#:~:text=Sungai%20Citarum%20mengairi%20lahan%20pertanian%20420.000%20hektare%20lahan,menghasilkan%201.888%20mw%20listrik%20untuk%20interkoneksi%20Jawa%20Bali>.
- Imansyah, M. (2012). STUDI UMUM PERMASALAHAN DAN SOLUSI DAS CITARUM SERTA ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH. *Jurnal Sositelknologi Edisi 25*, 18–33. file:///C:/Users/acer/Downloads/Muhammad%20Fadhil%20Imansyah.pdf
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Data dari Bappenas menyebutkan bahwa populasi penduduk di DAS Citarum*. <https://kmc-pengairan.bappenas.go.id/knowledge->

management/401#:~:text=Aliran%20DAS%20Citarum%20melintasi%2013%20k
 abupaten%20kota%20dengan%20total,32%25%20dari%20total%20luas%20wila
 yah%20Provinsi%20Jawa%20Barat.

Kresna. (2019, September 24). *Model Analisis Interaktif Miles & Huberman (skripsi dan tesis)*. Namaha: Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah. <https://konsultaskripsi.com/2019/09/24/9597/>

Kumparan News. (2024, June 13). Nasib Sungai Citarum, Saksi Bisu Peradaban Jabar yang Kini Jadi Lautan Sampah. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparannews/nasib-sungai-citarum-saksi-bisu-peradaban-jabar-yang-kini-jadi-lautan-sampah-22vQi7BcqsO>

Marliani, L. (n.d.). DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 17–21. Retrieved April 27, 2025, from file:///C:/Users/acer/Downloads/Lina%20Marliani.pdf

Mohamad, R., & Niode, I. (2020). Analisis Strategi Daya Saing (Competitive Advantage) Kopia Karanji Gorontalo. : : *JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 13(1), 1–14. file:///C:/Users/acer/Downloads/Rifki%20Mohamad%20&%20Idris%20Yanto%20Niode.pdf

Perpres Nomor 15 Tahun 2018. (n.d.). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM*. Retrieved April 27, 2025, from file:///C:/Users/acer/Downloads/Perpres%20Nomor%2015%20Tahun%202018.pdf

Pinter Politik. (2018). *Sungai Citarum Sumber Kehidupan yang tercemar*. <https://www.pinterpolitik.com/infografis/sungai-citarum-sumber-kehidupan-yang-tercemar/>

Raja Plastik Indonesia. (2024, March 23). *Administrasi Lingkungan Adalah: Menyelaraskan Pembangunan dan Konservasi*. *Rajaplastikindonesia.com*.

<https://rajabplastikindonesia.com/administrasi-lingkungan-adalah-menyelaraskan-pembangunan-dan-konservasi/>

Ramdhani, D., & Gabrillin, A. (2022, February 21). Sungai Citarum Tercemar Limbah Obat-obatan, Ini Respons DLH Jabar. *Kompas.Com*.
<https://bandung.kompas.com/read/2022/02/21/173936678/sungai-citarum-tercemar-limbah-obat-obatan-ini-respons-dlh-jabar#:~:text=BANDUNG%2C%20KOMPAS.com%20%20Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20%28DLH%29%20Jawa,penyebab%20tercemarnya%20Sungai%20Citarum%20dengan%20kandungan%20obat-obatan%20kimia.>

Reza, I. (2016). REDEFINISI PUBLICNESS DALAM RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 195–213.
<https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12626>

Setiady, T. (2024). PENCEGAHAAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CITARUM AKIBAT LIMBAH INDUSTRI. *Universitas Wiralodra, Indramayu*, 185–198.
<file:///C:/Users/acer/Downloads/Tri%20Setiady.pdf>

Setyaningrum, P. (2022, November 10). Sungai Citarum, Sungai Terpanjang di Jawa Barat yang Menyimpan Sejarah Kerajaan Tarumanegara. *Kompas.com*.
<https://bandung.kompas.com/read/2022/11/10/163648478/sungai-citarum-sungai-terpanjang-di-jawa-barat-yang-menyimpan-sejarah>

Tempo.co. (2021, July 28). KLHK Ungkap Penyebab 59 Persen Sungai di Indonesia Tercemar Berat. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/klhk-ungkap-penyebab-59-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-berat-490011>

Wicaksono, K. (2013). *APLIKASI PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI DALAM BIROKRASI INDONESIA*.
<file:///C:/Users/acer/Downloads/Kristian%20Widya%20Wicaksono.pdf>

Wijayanti, N., & Wicaksana, F. (2023). IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN GEORGE R TERRY DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1), 30–43.
<https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.04>

Wikipedia. (2025, April 26). *Ci Tarum*. id.wikipedia.org.